

SKRIPSI

**DETERMINASI TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun oleh :

ANANDA ARIEZA

NIM. 190604069

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ananda Arieza
NIM : 190604069
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 April 2025
Yang Menyatakan



Ananda Arieza

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
DETERMINASI TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KOTA BANDA ACEH

Disusun Oleh:

Ananda Arieza
NIM: 190604069

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II



Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.i., M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**DETERMINASI TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Ananda Arieza
NIM: 190604069

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 April 2025 M
22 Syawal 1446 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197009171997031002

Sekretaris

Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc
NIP. 198803192019032013

Penguji I

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 197204281999031005

Penguji II

Uliya Azra, S.E., M.Si
NIP. 199410022022032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ananda Arieza
NIM : 190604069
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 190604069@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Determinasi Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 April 2025

Penulis

Ananda Arieza
NIM. 190604069

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc
NIP. 198803192019032013

KATA PENGANTAR



Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan memuliakannya diatas makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul “**Determinasi Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kota Banda Aceh**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1), Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Shalawat dan salam juga tidak lupa atas pemimpin umat islam yakni baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari proses dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, berkat dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhormat kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si dan Uliya Azra, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing I dan Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc selaku pembimbing II sekaligus Pembimbing

Akademik (PA) yang telah banyak membantu, memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si sebagai penguji I dan Uliya Azra, S.E., M.Si sebagai penguji II yang senantiasa dalam menguji dan mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi bermutu dan berkualitas.
6. Dosen-dosen, dan staf akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Aparatur Desa se-Kota Banda Aceh yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muazzamsyah, S.H dan Ibunda Armiami, S.Psi yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada adik saya Indah Salsabila, S.Farm., dan M. Zawil Alqhifari yang telah memberikan semangat serta memberi dorongan selama proses pembuatan skripsi ini, serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi leting 2019 beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

10. Ananda Arieza, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berhasil bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga sukses Dunia wal Akhirat, Aamiin.

Semoga Allah akan membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Aamiin ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 15 April 2025

Penulis,

Ananda Arieza



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā

يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Ananda Arieza
NIM : 190604069
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : “Determinasi Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kota Banda Aceh”
Pembimbing I : Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si.
Pembimbing II : Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc.

Fenomena meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dalam sektor pemerintahan, termasuk di tingkat desa, menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Transparansi dalam laporan keuangan desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mencegah potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi APBDesa sebagai faktor yang berpengaruh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 100 aparatur desa sebagai responden se-Kota Banda Aceh. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Data primer diperoleh dari kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta aksesibilitas yang baik bagi masyarakat desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan memastikan keterbukaan akses terhadap laporan keuangan desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDesa.

Kata kunci: *Transparansi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	10
2.1.1 Fungsi dan Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	10
2.1.2 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	12
2.2 Transparansi.....	12
2.2.1 Transparansi Dalam Islam	13
2.2.2 Manfaat Transparansi	14
2.2.3 Indikator Transparansi.....	14
2.3 Penyajian Laporan Keuangan	17
2.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Dalam Islam	18
2.3.2 Proses Terjadinya Penyajian Laporan Keuangan	19
2.3.3 Penyajian Laporan Keuangan APBDesa	19

2.3.4	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyajian Laporan Keuangan.....	20
2.3.5	Indikator Penyajian Laporan Keuangan	21
2.4	Aksesibilitas Laporan Keuangan	22
2.4.1	Aksesibilitas Laporan Keuangan APBDesa	23
2.4.2	Tujuan Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	23
2.4.3	Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan	24
2.5	Hubungan Antar Variabel.....	25
2.5.1	Hubungan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi	25
2.5.2	Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi	25
2.6	Penelitian Terkait	26
2.7	Kerangka Berpikir.....	29
2.8	Hipotesis	29
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1	Desain Penelitian	31
3.2	Lokasi Penelitian.....	31
3.3	Populasi dan Sampel.....	32
3.3.1	Populasi	32
3.3.2	Sampel	32
3.4	Sumber Data	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Metode Analisis Data.....	36
3.6.1	Definisi dan Operasional Variabel	37
3.6.2	Uji Validasi dan Reliabilitas	40
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	40
3.6.4	Pengajuan Hipotesis	43
3.6.5	Koefisien Determinasi (R^2).....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum Kota Banda Aceh	46
4.2	Karakter Responden.....	47
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan.....	48
4.3	Deskriptif Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian	49
4.3.1	Deskriptif Tanggapan Responden Terhadap Variabel Transparansi	49
4.3.2	Deskriptif Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penyajian Laporan Keuangan.....	50

4.3.3	Deskriptif Tanggapan Responden Terhadap Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan	51
4.4	Hasil Instrumen Penelitian	52
4.4.1	Statistik Deskriptif	52
4.4.2	Hasil Uji Validitas	54
4.4.3	Hasil Uji Reliabilitas	55
4.5	Hasil Pengujian Asumsi Klasik	56
4.5.1	Uji Normalitas	56
4.5.2	Uji Multikolinearitas	57
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	57
4.6	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.7	Hasil Pengujian Hipotesis	60
4.7.1	Uji Parsial (Uji t)	60
4.7.2	Uji Simultan	61
4.7.3	Koefisien Determinasi (R^2)	62
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.8.1	Pengaruh Variabel Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kota Banda Aceh	63
4.8.2	Pengaruh Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kota Banda Aceh	64
4.8.3	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kota Banda Aceh	66
BAB V	PENUTUP	68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	68
DAFTAR	PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	26
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	39
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Tanggapan Responden Terhadap Variabel Transparansi.....	49
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penyajian Laporan Keuangan.....	50
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Tanggapan Responden Terhadap Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner.....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial.....	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan.....	61
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Kota Banda Aceh.....	47
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan.....	48
Gambar 4.4 Probability Plot.....	56
Gambar 4.5 Hasil Uji Scatterplot.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik termasuk juga pemerintahan desa (Mardiasmo, 2009).

Desa merupakan tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebab desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga atau masyarakatnya sendiri (Wilopo, 2006). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, 2015 Pasal 1, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi dana desa (ADD) yang termasuk ke dalam salah satu pendapatan desa, maka pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya termasuk ke dalam akuntabilitas keuangan publik. Saat ini akuntabilitas keuangan publik sangat rentan sekali dengan adanya potensi penyelewengan, maka dalam hal akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan atau *fraud*.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asiyah, 2022). Sedangkan hak dan kewajiban desa termuat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 BAB VI Pasal 67. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan pemerintah desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014). Undang-undang desa memberikan konsekuensi pendanaan yang harus dialokasikan untuk pembangunan desa hingga di tingkat paling bawah dengan tujuan untuk percepatan. Pendanaan desa setiap tahun meningkat, pemerintah desa melalui undang-undang desa mempunyai kewenangan secara otonom untuk mengelola sejumlah dana untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat desa. Oleh sebab itu perlu dituntut akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mengingat dana yang berasal dari APBN ini nilainya cukup besar.

Dalam hal ini tidak hanya pemerintah desa saja yang berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, akan tetapi masyarakat juga harus berperan aktif untuk menghasilkan kebutuhan desa. Masyarakat desa juga berhak mengetahui dan mengawasi proses berjalannya pembangunan desa, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk kesejahteraan desa, yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat desa dan laporan keuangan desa adalah pemerintah desa. Pemerintah desa harus melaksanakan laporan keuangan desa dengan baik dan wajib dilaporkan.

Laporan keuangan desa dilaporkan satu kali dalam setahun atau secara periodik, laporan tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014).

Laporan keuangan desa dapat mewujudkan *good governance* dengan prinsip transparansi. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan, menurut Sofyani dalam (Bima, 2022). Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Prinsip transparansi ini sangat penting, mengingat pemerintah memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak kepada masyarakat. Masyarakat sebaiknya mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga berbagai kebohongan dan perbuatan korupsi dari berbagai pihak dapat dihindari, oleh karena itu transparansi menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dan konstruktif dalam mengembangkan gagasan, baik secara informal maupun melalui lembaga yang menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam transparansi ini.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Pencapaian suatu transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang transparan. Dengan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik, diharapkan kinerja pemerintahan desa akan meningkat dan tercipta *good governance* (Pratolo, 2013). Dengan terwujudnya *good*

governance, oleh karenanya pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah lokal (Wahyu, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi transparansi adalah penyajian laporan keuangan desa, penyajian laporan keuangan desa merupakan suatu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran normatif tersebut terdapat pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan pada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71, 2010) yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyajian laporan keuangan desa yang baik dan didukung oleh kemampuan aparatur desa yang kompeten dapat terhindar dari adanya tindak kecurangan.

Laporan keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan desa yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan laporan kekayaan milik desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016), komponen laporan keuangan desa yang disusun dalam Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA) desa, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan (CALK) desa.

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, Kepala Desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya. Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara bertahap atau sistematis dengan melibatkan berbagai pihak seperti dari pemerintah desa. Rakyat bisa secara langsung memantau kemana dan untuk apa saja dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif (Kanter, 2021).

Aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*, karena salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah aksesibilitas laporan keuangan yang baik. Pemerintah desa harus bersikap transparan dalam kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Kanisius, (2003) menjelaskan teori aksesibilitas menyatakan bahwa suatu tujuan yang mudah dicapai secara langsung, terus-menerus dan penuh arti merupakan tujuan yang lebih mungkin untuk ditindaklanjuti. Masyarakat (publik) pada dasarnya memiliki hak dasar terhadap pemerintah, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan dan diberi informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan berarti memberi akses ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh laporan keuangan dengan mudah dan biaya murah (Santi, 2018). Hasil penelitian (Wardana, 2016) mengindikasikan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Nurlaili, 2016) menemukan aksesibilitas laporan keuangan daerah juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Saidin, 2022) menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wawoone belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa. Hal ini terjadi karena keterbukaan pengelolaan APBDesa masih terdapat pendapatan desa dari PADesa yaitu BUMDes yang belum dimasukkan dalam laporan realisasi APBDDes. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sangki, 2017) pada penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDDes. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul yang berkaitan dengan salah satu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdapat pada sebuah teori. Penelitian ini dilakukan pada tiga kecamatan yakni kecamatan Banda Raya, Kuta Alam dan Ulee Kareng dengan alasan karena desa pada kecamatan ini tergolong sebagai desa mandiri. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa mandiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri, dan menurut data Indeks Desa Mandiri berbasis SDGs adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang

bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Desa pada kecamatan ini memiliki nilai APBDesa yang tinggi, begitupun dengan Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang cukup besar pada tiap-tiap desa dalam kecamatan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Determinasi Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyajian Laporan Keuangan Desa berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana Penyajian Laporan Keuangan Desa dan Aksesibilitas Keuangan Desa berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Penyajian Laporan Keuangan Desa terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Penyajian Laporan Keuangan Desa dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Transparansi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu agar dapat menjadi khazanah keilmuan atau tambahan keilmuan terkait dengan bagaimana faktor yang mempengaruhi Penyajian Laporan Keuangan Desa dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain itu peneliti juga mengharapkan agar dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini yaitu agar dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk faktor yang mempengaruhi Penyajian Laporan Keuangan Desa dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

3. Manfaat Kebijakan

Adapun manfaat kebijakan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi peneliti lanjutan untuk tema yang sama dan dapat dijadikan acuan dasar dalam memulai peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar menyederhanakan pada penyusunan skripsi ini, penyusunannya memakai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama yaitu bab pendahuluan. Pada bab ini di uraikan penjelasannya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua bab pembahasan teoritis. Pada bab ini nantinya dibahas mencakup teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian terkait, kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis. Teori-teori yang ingin dipakai menjadi dasarnya bahas tentang gambaran umum oleh transparansi APBDesa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga ialah bab metode penelitian. Di bab inilah bagian yang berisikan mengenai metode penelitian yang akan dipakai, jenis dan sumber data, sampel penelitian, serta variable penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan bab yang membahas mengenai karakteristik responden, deskriptif variabel. Serta membahas dengan detail uji validitas, reabilitas, regresi linear berganda, hipotesis dan juga hasil penelitian pengaruh variabel X dengan variabel Y

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi mengenai penutup, kesimpulan dan saran yang terdapat pada penelitian.